PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 18 Mei 2015 Halaman: 15

Haryadi Tegas Larang Bus Masuk

Uji Coba Tahap Dua Penataan Kawasan Cagar Budaya Dimulai

YOGYA, TRIBUN - Memasuki uji coba rekayasa lalu lintas tahap dua di kawasan Alun-alun utara dan Jerong Beteng, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan kendaraan yang tidak boleh memasuki kawasan cagar budaya tersebut adalah kendaraan yang berdimensi lebih dari lima meter.

Haryadi Suyuti, Wali Kota Yogyakarta mengatakan larangan kendaraan yang masuk ke kawasan Alun-alun utara dan Jeron Beteng tidak lagi dibatasi oleh jumlah seat, melainkan besaran dimensi panjang kendaraan.

"Bus-bus besar mutlak tidak boleh masuk, apalagi yang berdimensi lebih dari lima meter. Mereka harus parkir di lahan parkir yang sudah disediakan, yaitu Ngabean atau Senopati," kata Haryadi, Minggu (17/5).

Sementara kendaraan yang berdimensi kurang dari atau sama dengan lima meter, masih diperbolehkan masuk ke kawasan tersebut. Namun hanya diizinkan untuk melakukan *drop off*. Setelah itu akan diarahkan untuk parkir di area yang sudah disediakan. Parkir di pinggir jalan pun akan ditertibkan karena tidak sesuai dengan aturan.

Haryadi pun menjelaskan, pelaksanaan uji coba kedua ini merupakan hasil dari masukan dan jajak pendapat dari berbagai pihak. Pemkot Yogyakarta juga menggandeng kalangan akademisi untuk melakukan kajian terkait hal tersebut. Sehingga kebijakan yang nantinya diambil bisa mengakomodir pihak-pihak yang bersangkutan.

> "Bus-bus besar mutlak tidak boleh masuk, apalagi yang berdimensi lebih dari lima meter. Mereka harus parkir di lahan parkir yang sudah disediakan, yaitu Ngabean atau Senopati"
>
> HARYADI SUYUTI
> Walikota Yogyakarta

"Uji coba akan terus dilakukan hingga semua pihak yang bersangkutan tidak merasa dirugikan. Kami melakukan pertimbangan secara matang dan mendengarkan semua pihak," ujarnya.

Oleh karena itu untuk menciptakan sesuatu yang seimbang antar semua pihak, Haryadi menegaskan pihaknya tidak akan mematok waktu berapa lama uji coba akan berlangsung. Kebijakan ini akan disahkan jika gejolak di masyarakat mulai hilang.

Sementara Ali Fahmi, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta meminta Pemkot Yogyakarta harus melakukan sosialisasi secara menyuluruh. Sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku wisata tidak setengah-setengah. Menurutnya, penataan kawasan Malioboro, Keraton, dan sekitarnya masih rawan gesekan.

Ia menilai gejolak yang selama ini datang dari para pelaku wisata akibat penataan kawasan Alun-alun utara dan Jeron Beteng, akibat proses sosialisasi yang tidak maksimal. Hingga akhirnya penolakan pun ramai bermunculan.

"Kalau Pemkot sudah memiliki konsep besar penataan Jeron Beteng dan Alun-alun utara bisa mulai segera disosialisasikan. Sosialisasi harus per tahapan dan detailnya, sehingga para pelaku yang terlibat langsung bisa mengetahui informasi yang menyeluruh," papar Fahmi.

Adanya sosialisasi secara detail, lanjut Fahmi, juga membantu Pemkot Yogyakarta dalam mematangkan konsep penataan kawasan tersebut. Artinya dalam proses sosialisasi, masukan-masukan yang berasal dari masyarakat dan para pelaku wisata bisa langsung ditampung.

"Kedua hal tersebut harus disinergikan. Kalau penataan melibatkan masyarakat yang terdampak, pasti akan minim kontroversi," tandasnya. **(tiq)**

Yogyakarta, ...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Ketertiban 3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005